

UPAYA PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA

Sigit Indrawijaya¹⁾, Asep Machpudin²⁾, Dahmiri³⁾

^{1,2,3)}Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah dalam rangka pengembangan usaha di Kabupaten Batang Hari Jambi. Dari hasil FGD serta dari hasil wawancara dengan *keypersons* maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan UKM dapat dilakukan dengan melakukan melalui akses usaha dengan cara melakukan pelatihan manajemen dan kreativitas dalam produksi pemberian kredit dengan bunga lunak, melalui akses pasar dengan cara menyediakan rumah dagang, melalui pemasaran hasil dan membuka peluang pasar, melalui akses teknologi dengan memberikan bantuan teknologi dengan harga terjangkau, memberikan bimbingan dan konsultasi, melalui akses Sumber Daya Manusia dengan cara melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis, memberikan pelatihan dalam upaya meningkatkan jiwa kewirausahaan, menyediakan tenaga penyuluh, membuka lembaga pendidikan.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Industri Kecil dan Menengah, Pengembangan Usaha

Latar Belakang

Ketika terjadi krisis ekonomi, Industri Kecil dan menengah berperan sangat penting dalam menyelamatkan keberadaan perekonomian nasional. Hal ini dapat dilakukan IKM salah satu penyebabnya adalah karena mereka cenderung menggunakan bahan baku lokal dan bahan impor yang kecil proporsinya. Produksi IKM tidak terlalu dipengaruhi depresiasi nilai rupiah, sehingga lebih tahan terhadap guncangan perekonomian global, meskipun sangat dipengaruhi oleh perubahan daya beli masyarakat. Pada tahun 2006 total populasi IKM lebih dari 42 juta dan memberikan sumbangan dalam output nasional (PDRB) mencapai 56,7% dan dalam ekspor non migas 15%, serta mempunyai andil 99,6% dalam penyerapan tenaga kerja (Ardi Said dan Ika Widjaja, 2007).

Dalam peningkatan ekonomi suatu negara, peran Industri kecil dan menengah memainkan peran yang sangat penting baik pada negara berkembang maupun pada negara maju. Industri Kecil dan menengah adalah kelompok usaha yang perannya juga sangat strategis dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja karena IKM mampu menyerap tenaga kerja yang sangat besar dan juga pada sisi kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), maka kontribusinya paling besar jika dibandingkan dengan kontribusi PDB yang disumbangkan oleh usaha-usaha besar.

IKM pada kenyataannya sebagian besar sangat sulit berkembang, mereka kebanyakan hanya mampu bertahan. Sudah banyak upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah dalam upaya mendorong perekonomian masyarakat kearah yang lebih baik. Persoalan yang dihadapi bukanlah semata-mata persoalan dana meskipun dana tetap diperlukan oleh IKM. Faktor-faktor lain seperti

pengelolaan kelembangan, input, proses, dan kualitas output yang relatif rendah diduga merupakan faktor-faktor penyebabnya. Oleh karena itu, agar IKM bisa optimal maka harus diupayakan pengelolaan sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap peningkatan kinerja usaha dan daya saing.

Hasil penelitian sebelumnya yang membahas berbagai sisi dari IKM, terdapat beberapa kesamaan prinsip, bahwa pemberdayaan IKM dalam upaya pengembangan IKM sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sumber daya manusia, manajemen, teknologi dan pemasaran IKM. (Dahmiri 2013, Ade Octavia dkk, 2012).

Masalah yang dihadapi IKM yang ada di Kabupaten Batang Hari dalam usahanya umumnya karena kelemahan pada sisi pemberdayaan sehingga sulit dalam perkembangan usaha. IKM yang tumbuh di kabupaten Batang Hari cukup banyak mulai dari IKM makanan, kerajinan, pengolahan dan lain-lain. Dapam upaya memberdayakan dan mengembangkan IKM pihak Pemerintah Kabupaten Batang Hari masih hanya terfokus pada upaya pemberian bantuan secara finansial. Padahal sebenarnya masalah riil yang dihadapi oleh IKM sendiri lebih kompleks, disamping masalah modal secara finansial juga meliputi masalah pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, operasional dan pemasaran.

Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang meneliti pemberdayaan dalam rangka pengembangan IKM di Kabupaten Batang Hari. Harapan dari penelitian ini kiranya dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana tingkat pemberdayaan IKM dan dapat dirumuskan upaya pemberdayaan sehingga IKM di Batang Hari mampu berkembang dengan baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Industri Kecil Menengah (IKM)

Definisi usaha kecil menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Menurut kategori *Biro Pusat Statistik* (BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu: (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih (BPS, 2006).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1995, disebut sebagai industri kecil harus mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu miliar rupiah);
- c. milik Warga Negara Indonesia;
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;

- e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha menengah mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. milik Warga Negara Indonesia;
- c. berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar;
- d. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum.

Pusat Studi Usaha Kecil dan Menengah UIEU (Mai 2008) menyatakan bahwa tingkat permasalahan dari 30 UKM yang dibina dengan urutan permasalahan adalah pengelolaan keuangan, pemasaran, tenaga kerja dan produksi. Oleh karena itu maka diperlukan kajian lebih lanjut untuk menggali lebih jauh masalah mendasar dari IKM di Provinsi Jambi berkaitan dengan tata kelola keuangan, SDM, operasional dan pemasaran yang muaranya adalah peningkatan kinerja agar menjadi IKM survive di tengah-tengah persaingan global.

Tata kelola korporasi berhubungan dengan pengambilan keputusan pada tingkat dewan direksi dan manajemen pada tingkat atas (Mulbert, 2010). Stapledon (1997) menjelaskan bahwa tata kelola korporasi meliputi para pemegang saham, pihak manajemen yang dipimpin oleh *Chief Executive Officer* (CEO) dan dewan direksi. Kinerja usaha digambarkan sebagai capaian yang diperoleh organisasi bisnis dalam usahanya. Menurut Musran Munizu (2010) variabel kinerja usaha memiliki indikator pertumbuhan penjualan, pertumbuhan modal, pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan pasar dan pertumbuhan laba.

Pemberdayaan IKM

Pengertian pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata "*empowerment*", yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. (Moeljanto dalam Wahono et al, 2001).

Shardlow (1998) menyimpulkan bahwa pengertian pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Pemberdayaan IKM tidak melakukan langkah-langkah instruktif, maupun mendikte, tetapi mendorong supaya IKM dapat berpartisipasi dalam menentukan kebijaksanaan yang berhubungan dengan IKM.

Menurut Bank Dunia, *Empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives.* Pemberdayaan merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat (Susilowati et al., 2005).

Bentuk-bentuk pendekatan dan metode-metode dimana dalam merencanakan perkembangan penduduk lokal dilibatkan dan dapat mengekspresikan, meningkatkan, membagi, menganalisa pengetahuan atau pemahaman mereka, untuk secara aktif memungkinkan mereka merencanakan dan bertindak dalam pembangunan, lebih-lebih di bidang ekonomi yang merekaterlibat secara langsung (Isbandi Rukminto Adi, 2003).

Menurut Alen (1993) ada 3 unsur dasar di dalam pengembangan dan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat, yaitu:

Pertama, tujuannya untuk memampukan masyarakat dalam mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan mereka, mengembangkan kemandirian dan memantapkan kebersamaan diantara mereka. IKM yang merupakan usaha pada skala kecil, diperlukan adanya kebersamaan diantara mereka untuk mewujudkan kekuatan yang lebih besar baik pada modal, produksi sampai penguasaan pasar (Dirjen pembinaan pengusaha kecil, 1995).

Kedua, proses pelaksanaannya melibatkan kreatifitas dan kerja sama masyarakat ataupun kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut. Kerja sama dan kreativitas merupakan prasyarat untuk mewujudkan masyarakat yang dinamis, kreatif dan kooperatif.

Ketiga, pendekatan yang baik untuk digunakan adalah pengembangan masyarakat yang bersifat non direktif. Maksud pendekatan ini adalah memfokuskan pada peran pemercepat perubahan (*enabler*), pembangkit semangat(*encourager*) dan pendidik (*educator*). Demikian juga pemerintah atau swastadalam berhubungan dengan pengusaha-pengusaha kecil, pendekatan yang digunakan yang bersifat non direktif (Batten dalam Glen, 1993).

Kendala Pemberdayaan IKM

Tambunan (2002) menyatakan bahwa meski diakui ketangguhannya, namun peran UKM dalam perekonomian nasional ternyata masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh sulitnya akses dalam pendanaan. Walaupun berbagai lembaga dan skim kredit untuk UKM telah dibentuk, kesulitan pengadaan bahan baku, ketergantungan produk UKM terhadap pasar domestik, belum tersedianya SDM yang handal sesuai dengan kebutuhan, belum siapnya UKM dalam menghadapi persaingan global karena produktivitas dan mutu yang rendah, masih lemahnya akses terhadap sumber informasi (pasar, teknologi dan disain), rendahnya penguasaan teknologi, serta sederet faktor lain merupakan UKM sulit berkembang.

Menurut Sucherly (2006) jumlah Usaha kecil sangat banyak tetapi tidak konsisten, bukan yang lama tambah yang baru, namun seringkali pula yang lama mati dan kemudian muncul yang baru. Faktor ini pulalah yang menyebabkan jumlah dari IKM sulit untuk diidentifikasi. Karena industri kecil banyak yang tidak teridentifikasi, maka industri kecil tersebut banyak pula yang luput dari perhatian pemerintah.

Kendala dalam pemberdayaan IKM karena sering ditemui inkonsistensi di kalangan pembuat kebijakan. Adanya dualisme kepentingan antara komitmen politik dan pemerintah untuk mengembangkan IKM dengan langkah nyata di tataran program operasional dari berbagai pihak/otoritas terkait antara lain : (1) dukungan sumberdaya, prasarana/sarana penunjang, bantuan teknik, insentif, perlakuan kemudahan (fasilitasi), (2) banyak pola-pola bantuan teknik, 3) yang kurang efektif, antara lain karena

penerapan pola umum tersebut secara atas-bawah (top-down) kurang mempertimbangkan aspek kelayakannya menurut kondisi spesifik obyek binaan di lapangan, serta kurang konsistennya dukungan sumberdaya dan lemahnya manajemen, (3) kurangnya pendekatan pemecahan masalah pengembangan secara komprehensif, dengan konsekuensi pentingnya keterpaduan dalam pelaksanaan, (4) belum efektifnya mekanisme bawah-atas (bottom-up) di lapangan, (5) banyak program pemberdayaan, khususnya kegiatan pendidikan dan pelatihan banyak yang kurang memenuhi kebutuhan nyata dari obyek binaan di lapangan, (6) intervensi pemerintah, termasuk sistem insentif yang ada sering kali kurang menyentuh kebutuhan sektor riil. Pengembangan sistem insentif baru sering terkendala oleh cara pandang sempit dan kepentingan jangka pendek, serta (7) kekhawatiran akan penyalah-gunaan karena lemahnya aspek pengawasan.

Prinsip Pengelolaan korporasi yang baik

Menurut Crowther dan Seifi (2010), ukuran untuk menentukan penataan dan pengelolaan yang baik masih menjadi perdebatan. Akan tetapi, penataan dan pengelolaan yang baik akan menciptakan beberapa hal positif bagi perusahaan seperti dibawah ini:

1. menciptakan nilai yang berkelanjutan
2. meningkatkan kepuasan *shareholders*
3. peningkatan manajemen yang efektif dan efisien
4. adanya resiko manajemen yang efisien
5. Meningkatkan kredibilitas perusahaan
6. Terciptanya korporasi yang akuntabel dan bertanggung jawab
7. Adanya keseimbangan diantara keuntungan ekonomi dan sosial
8. Adanya tanggung jawab yang adil
9. Peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Ada 4 (empat) prinsip dari pengelolaan yang baik menurut Crowther dan Seifi (2010) yaitu :

1. Transparansi (*transparency*), yang berarti perusahaan harus transparan dengan semua prosedur tata kelola
2. Akuntabilitas (*accountability*), yang berarti struktur laporan keuangan harus jelas
3. Tanggung jawab (*responsibility*), yang berarti seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah diambil.
4. Adil (*fairness*), yang berarti bahwa sistem perusahaan harus berjalan dengan adil, yakni tidak memihak dengan apapun dan tanpa berprasangka dengan siapapun.

Dalam penataan dan pengelolaan korporasi, diperlukan suatu sistem manajemen yang baik dan tepat. Manajemen dapat diinterpretasikan untuk mengatur sebuah perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai dari pemegang saham atau *shareholders* (Crowther dan Seifi, 2010). Mereka menambahkan bahwa prosedur penataan dan pengelolaan korporasi menentukan peran dari manajemen perusahaan dari setiap aspek dan berusaha menyeimbangkan dan membangun mekanisme pengawasan untuk meningkatkan kepuasan dari pemegang saham dan pemangku kepentingan.

2.5. Kinerja Usaha

Menurut Musran Munizu (2010) variabel kinerja usaha memiliki indikator pertumbuhan penjualan, pertumbuhan modal, pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan pasar dan pertumbuhan laba. Kinerja usaha digambarkan sebagai capaian yang diperoleh organisasi bisnis dalam usahanya.

Kinerja merupakan sesebuah konsep multidimensional dan hubungan antara orientasi wirausaha dan kinerja dapat tergantung pada indikator-indikator yang digunakan untuk mengakses kinerja (Lumpkin dan Dess, 1996). Banyak kajian-kajian empiris yang melaporkan banyaknya perbedaan indikator-indikator kinerja (misalnya kajian Combs, Crook dan Shook, 2005; Venkataraman dan Ramanujam, 1986); umumnya adalah perbedaan antara ukuran kinerja financial dan kinerja non-finansial. Pengukuran kinerja non finansial mengukur juga sasaran (goals) usaha seperti misalnya kepuasan dan tingkat keberhasilan di lingkup global yang bisa dicapai oleh para pemilik atau para manajernya; pengukuran kinerja finansial mengukur faktor-faktor seperti pertumbuhan penjualan dan ROI (Smith, 1976). Berkaitan dengan kinerja finansial, seringkali terjadi konvergensi yang rendah antara indikator-indikator yang berbeda (Murphy, Trailer dan Hill, 1996).

Pada tingkat konseptual, seseorang dapat membedakan antara pengukuran pertumbuhan dan pengukuran profitabilitas. Walaupun konsep-konsep tersebut secara empiris dan secara teoritis saling berhubungan, ada juga perbedaan-perbedaan penting diantara keduanya (Combs et al., 2005). Misalnya, suatu usaha dapat melakukan investasi yang besar untuk mendukung pertumbuhan usaha dalam jangka panjang, namun demikian harus berjuang untuk mendapatkan laba jangka pendek. Pendapat konseptual yang utama mengenai hubungan antara orientasi wirausaha dan kinerja berfokus pada aspek financial kinerja. Usaha-usaha yang memiliki orientasi wirausaha yang tinggi dapat mentargetkan segmen pasar premium, menetapkan harga jual yang tinggi dan menempati posisi pasar yang lebih unggul dari para pesaingnya, yang tentunya akan menghasilkan laba yang lebih besar dan bisa lebih cepat untuk melakukan ekspansi (Zahra dan Covin, 1995).

Sejalan dengan Muzzafar et al., (2009), Bird's (1989) mengeksplor mengenai kinerja usaha bisnis kecil yang sukses yang dikarakteristikkan oleh perilaku inovasi dan pengambil resiko. Duchesneau dan Gartner (1990) mengidentifikasi tiga kategori yang mempengaruhi kesuksesan dari bisnis ini seperti karakteristik entrepreneur, perilaku awal dan strategi perusahaan secara keseluruhan. Lebih lanjut mereka menjelaskan bahwa faktor-faktor yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan sebuah bisnis kecil adalah pengalaman sebelumnya, jam kerja yang lama, perencanaan yang baik, usaha untuk mengurangi resiko, komunikasi yang baik dan pelayanan yang maksimal kepada konsumen.

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

1. Mengkaji masalah yang dihadapi Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Batang Hari dalam upaya pemberdayaan IKM.
2. Merumuskan upaya yang tepat dalam pemberdayaan sehingga IKM dapat berkembang secara baik di Kabupaten Batang Hari.

Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini berguna bagi upaya menemukan upaya yang tepat yang dapat diterapkan dalam pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Batang Hari.
2. Penelitian ini juga akan berguna bagi pelaku dalam Industri Kecil dan Menengah berupa pedoman dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha, berguna masyarakat sekitar lingkungan usaha memperoleh manfaat mendorong perekonomian, pihak pemerintah dapat memperoleh cara dalam upaya pemberdayaan IKM di wilayahnya.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung maupun tidak langsung dengan pihak-pihak antara lain adalah instansi terkait serta pemilik IKM. Informasi juga diperoleh dari instansi terkait menyangkut program-program yang telah dilakukan dan pembinaan kepada IKM di Kabupaten Batang Hari yang sudah dilaksanakan, sedangkan informasi yang diperoleh dari pelaku IKM adalah upaya yang sudah dilakukan dalam mengelola usaha. Data sekunder akan diperoleh dari instansi-instansi terkait, antara lain: Dinas Perindustrian Kabupaten Batang Hari, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari serta dinas-dinas yang melakukan pembinaan terhadap IKM di Kabupaten Batang Hari.

Metode Pengambilan Sampel

Penelitian ini digunakan metode survey kepada sebanyak 100 orang pemilik IKM di kabupaten Batang Hari, dengan mengumpulkan informasi dari seluruh responden yang diharapkan yang diharapkan akan memperoleh berbagai informasi. dalam metode survei ini adalah dengan menggunakan daftar kuesioner yang telah disiapkan terlebih dahulu. Untuk memperoleh data dari kuesioner agar mempunyai nilai objektivitas yang tinggi, maka studi ini tidak mengutamakan baik kuantitas responden maupun kualitas responden. Responden yang diambil adalah pemilik yang langsung terjun dan bergerak dalam IKM.

Pendekatan Penelitian dan Analisis

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menghasilkan profil sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang menjadi dasar penyusunan upaya pemberdayaan IKM yang sesuai dengan aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Data yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama adalah data primer yang terdiri pemberdayaan industri, ekonomi dan budaya masyarakat, metode pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara terstruktur menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Selain itu juga digunakan teknik *Focus Group Discussion* (FGD) dan *keypersons* (sebanyak 10% dari populasi) yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kondisi IKM. Disamping wawancara juga digunakan kuesioner terstruktur yang terkait dengan aspek-aspek yang akan diteliti. Penelitian ini akan menggunakan daftar kuesioner yang telah disiapkan terlebih dahulu. Pengumpulan informasi dari responden juga dilakukan dengan cara *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam dengan *keypersons*.

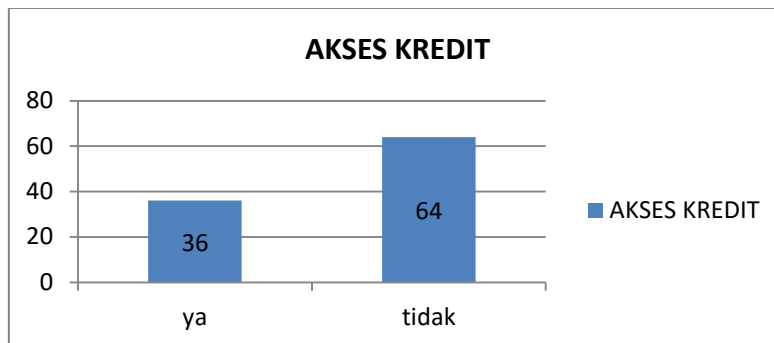
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Pemberdayaan IKM dalam rangka pengembangan usaha di Kabupaten Batang Hari diukur dengan beberapa akses, yaitu usaha, pasar, sumber daya manusia (SDM) serta teknologi dan masing-masing akses tersebut memiliki indikator pengukuran yang berbeda.

Akses usaha

Gambar 1. Akses Kredit Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Batang Hari

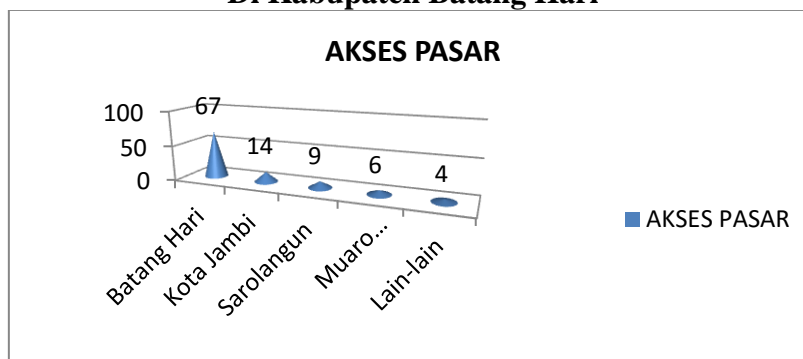


Sumber : Data primer diolah (2017)

Dari 100 responden, ternyata IKM yang pernah mendapatkan kredit hanya 36 responden (36%) yang bersumber dari berbagai pemerintah dan lembaga keuangan. Dari gambar 2 terlihat bahwa responden yang menyatakan pernah mendapatkan kredit jauh lebih kecil dibandingkan yang menyatakan tidak pernah mendapatkan kredit. Sebanyak 64 orang (64%) menyatakan tidak mendapatkan kredit dari manapun dalam melakukan kegiatan usaha. Hal yang sangat memprihatinkan dari hal ini adalah ketidaktahuan sebagian besar dari pelaku IKM bagaimana cara dan prosedur untuk mendapatkan pinjaman dan bantuan dari pemerintah dan lembaga keuangan baik bank maupun non bank.

Akses pasar

Gambar 2. Akses Pasar Industri Kecil Menengah Di Kabupaten Batang Hari

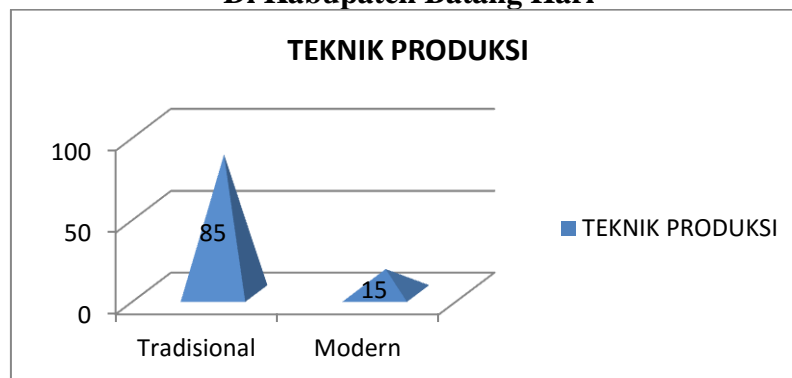


Sumber : Data primer diolah (2017)

Dari gambar 2 dapat kita lihat bahwa sebagian besar, hasil produksi IKM di Kabupaten Batang Hari untuk memenuhi pasar lokal yaitu Kabupaten Batang Hari sendiri yaitu 67%, sedangkan untuk akses pasar kabupaten tetangga masih sangat kecil, misalnya Kota Jambi hanya 14%, Kabupaten Batang Har 9%, Kabupaten Muaro Jambi 6 % dan lain-lain 4%. Jika kita amati maka dapat kita simpulkan bahwa akses pasar IKM di Batang Hari masih sangat rendah untuk menembus pasar di luar Kabupaten. Kendala yang dihadapi IKM adalah karena kurangnya ketersediaan akses informasi tentang pangsa pasar yang bisa dimasuki.

Akses Teknologi

Gambar 3. Teknik Produksi Usaha Kecil dan Menengah Di Kabupaten Batang Hari

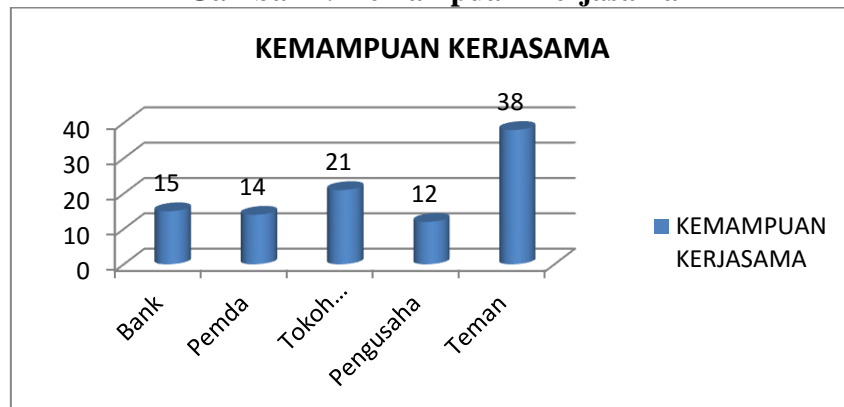


Sumber : Data primer diolah (2017)

Teknik produksi yang dilakukan IKM yang ada di Kabupaten Batang Hari sebagaimana pada gambar 3 diketahui bahwa sebagian besar responden (85%) menggunakan teknik produksi secara turun-temurun yang masih bersifat tradisional. Masih sedikit sekali responden yang melakukan perubahan perbaikan teknologi dalam memproduksi secara modern. Masih sedikit sekali responden yang mengikuti pelatihan formal dalam teknik produksi. Hal tersebut terjadi karena untuk menciptakan dan mengembangkan teknologi diperlukan biaya tinggi. Disamping itu pada umumnya masalah teknologi ditangani oleh bagian *research and development* (R&D), sedangkan pada IKM struktur organisasinya masih sangat sederhana yang tidak memiliki bagian *research and development*.

Kemampuan Menjalin Kerjasama

Gambar 4. Kemampuan Kerjasama



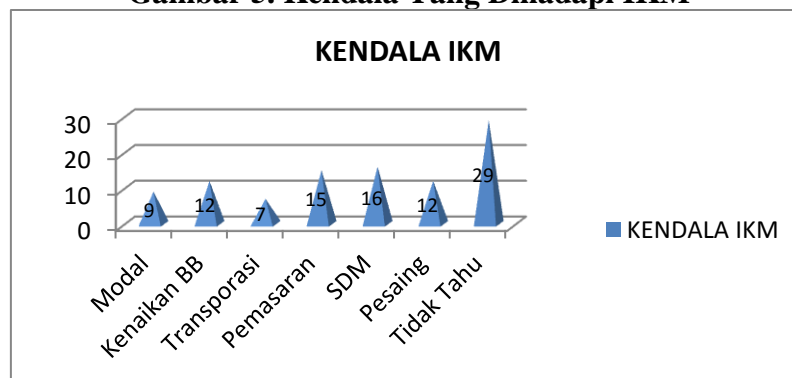
Sumber : Data primer diolah (2017)

Kemampuan kerjasama responden terhadap pihak-pihak yang kompeten seperti perbankan, pemda dan pengusaha yang ditunjukkan oleh gambar 4 adalah masih rendah. Kemampuan responden dalam menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang seharusnya menjadi sasaran yang akan mampu membantu peningkatan keberdayaan usaha. Kerjasama yang masih banyak dilakukan adalah dengan teman yaitu sebanyak 38 %. Kemampuan bekerjasama kepada pihak Pemda hanya dilakukan 14%, perbankan 15% dan kepada pengusaha hanya 12%.

Dari hasil wawancara yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa responden pelaku IKM di Kabupaten Batang Hari mempunyai hubungan yang lebih sempit atau menunjukkan kemampuan kerjasama yang rendah. Apabila dilihat dari hubungan antara pengusaha dan *stakeholders* terlihat bahwa sebagian besar dari mereka tidak memiliki kenalan pada semua *stakeholders* sehingga hal ini akan memperlemah kemampuan pemilik usaha dalam usaha peningkatan pemberdayaan mereka.

Keberlanjutan usaha

Gambar 5. Kendala Yang Dihadapi IKM



Sumber : Data primer diolah (2017)

Pada gambar 5 terlihat bahwa pelaku Industri Kecil Menengah di kabupaten Batang Hari lebih banyak yang tidak mengetahui kendala yang mereka hadapi dalam pengembangan usaha mereka. Sebanyak 21 % pelaku IKM tidak mengetahui kendala usaha mereka, sedangkan kendala dari sisi pemasaran dialami sebanyak 14% pelaku IKM, dari sisi kenaikan bahan baku IKM sebanyak 12%. Terjadinya berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku IKM ini disebabkan salah satunya adalah karena rendahnya tingkat pendidikan pelaku IKM dan pengalaman dalam usaha.

Upaya Pemberdayaan IKM berdasarkan Akses usaha

Upaya pemberdayaan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Batang Hari berdasarkan akses usaha dapat dilakukan melalui permodalan dan produksi. Dari analisis efisiensi pada sisi produksi diketahui, bahwa ada penggunaan faktor produksi yang efisien dan yang tidak. Dalam akses usaha yang perlu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti masalah efisiensi di atas, maka diusulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Melakukan Pelatihan bagi pelaku IKM
- b. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak
- c. Peningkatan teknik produksi menuju produksi modern
- d. Menyediakan sarana untuk konsultasi usaha
- e. Mengupayakan tersedianya lembaga penjamin
- f. Melakukan Penjaminan mutu produksi

Upaya Pemberdayaan IKM berdasarkan Akses pasar

Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap Upaya Pemberdayaan Industri Kecil Menengah dalam rangka pengembangan usaha di Kabupaten Batang Hari memperoleh informasi dan data bahwa tingkat keberdayaan masih rendah. Oleh karena itu diperlukan upaya keberdayaan melalui berbagai strategi diantaranya adalah :

- a. Menyediakan Informasi yang berkaitan dengan pasar seperti informasi tentang permintaan, harga, informasi ketersediaan produk di pasar, segmen harga, selera konsumen dan informasi tentang pesaing.
- b. Melakukan pameran perdagangan dengan membuat agenda/*tracking Event* pameran dan membangun jaringan dengan institusi.
- c. Melakukan kerjasama dengan *Stakeholders* lokal terutama dalam hal pemasaran produk dalam upaya membuka peluang pasar.
- d. Menyediakan lokasi sentra khusus usaha dan penerapan sistem bapak angkat untuk membantu yang kekurangan modal bagi IKM.

Upaya Pemberdayaan IKM berdasarkan Akses SDM

Upaya Pemberdayaan IKM di Kabupaten Batang Hari dari akses SDM terlihat masih rendah. Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan SDM dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan dan pelatihan dibagi menjadi dua macam yaitu yang formal dan non formal. Pendidikan formal dilakukan melalui perguruan tinggi atau sekolah kejuruan dengan berbagai program seperti memberikan beasiswa, dana CSR, pengabdian masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata bagi mahasiswa.

Upaya yang dapat dilakukan melalui pendidikan informal dengan mengadakan pelatihan manajerial, pelatihan kewirausahaan, pengelolaan produksi, pemasaran dan distribusi produk, sedangkan pendidikan informal misalnya memberikan penyuluhan

dan program kampanye yang bekerjasama dengan mitra usaha. Pelaksana pendidikan dan pelatihan non formal dapat dilakukan oleh Balai Latihan Kerja (BLK). Program pelatihan misalnya latihan/simulasi proses produksi (desain, *input* produksi, proses produksi, dan pengepakan) serta distribusi pemasaran.

Pihak-pihak yang terkait dalam upaya pemberdayaan IKM di Kabupaten Batang Hari diantaranya adalah pihak pemerintah, pihak swasta, LSM dan pihak akademisi. Upaya pemberdayaan diperlukan skala prioritas pelaksanaannya. Dalam jangka pendek perlu segera melakukan pelatihan manajerial, kewirausahaan, pemasaran dan distribusi serta memetakan peluang CSR secara intensif.

Upaya Pemberdayaan IKM berdasarkan Akses teknologi

a. Teknologi tepat guna

Yang dimaksud dengan Teknologi tepat guna adalah teknologi sederhana yang diterapkan oleh produsen untuk keperluan produksi pada umumnya industri di Kabupaten Batang Hari menggunakan teknologi tepat guna dalam produksi. Upaya pemberdayaan dalam akses teknologi lebih difokuskan pada peningkatan penggunaan teknologi. Kegiatan yang dilakukan pada akses ini antara lain :

- a. Penyuluhan dalam penggunaan teknologi inovatif dalam proses produksi dan pembuatan desain, kemasan dan pemasaran menggunakan dukungan teknologi dan elektronik.
- b. Melakukan penyuluhan dan bimbingan untuk memperoleh hak paten terhadap produknya, oleh sebab itu perlu diupayakan perlindungan terhadap hak paten.
- c. Pemanfaatan peluang CSR antara lain melakukan pelatihan terhadap produsen, terutama yang berkaitan dengan proses produksi dan manajerial.

b. Teknologi modern

Kelemahan IKM dalam berkembang salah satunya adalah kelemahan teknologi modern. Agar memiliki tingkat keberdayaan yang tinggi, harus berupaya untuk beralih dari teknologi tradisional menjadi teknologi modern. Dalam peralihan ini diperlukan sarana dan prasarana konsultasi dan pelatihan penggunaan teknologi tersebut. Perlu disediakan wadah tempat konsultasi setiap saat. Pada wadah ini akan didiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan proses peralihan teknologi. Pihak yang terkait dalam upaya ini, khususnya dari akses teknologi adalah pemerintah, swasta dan akademisi. Prioritas yang dapat dilakukan dalam jangka pendek adalah pelatihan penerapan dan informasi teknologi baru, sedangkan jangka panjang adalah bimbingan konsultasi hak paten dan fasilitasi peralatan produksi.

PENUTUP

Simpulan

- a. Pemberdayaan IKM di Kabupaten Batang Hari masih rendah. Indikator keberdayaan yang dijadikan indikator meliputi akses usaha, pasar, SDM, dan teknologi.
- b. Pemberdayaan IKM di Kabupaten Batang Hari berdasarkan hasil FGD dan wawancara mendalam dengan *keypersons* ditemukan bahwa keberdayaan tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa akses sebagai berikut:
 - 1). Akses Usaha: melakukan pelatihan manajemen dan kreativitas dalam produksi dan memberikan kredit dengan bunga lunak.

- 2). Akses Pasar: menyediakan rumah dagang dan membuka peluang pasar.
- 3). Akses SDM: melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis, memberikan pelatihan kewirausahaan, menyediakan tenaga penyuluh, membuka lembaga pendidikan dan pelatihan.
- 4). Akses teknologi: memberikan bantuan teknologi modern, memberikan bimbingan dan konsultasi hak paten.

Saran

1. Upaya pemberdayaan IKM di Kaupaten Batang Hari harus didukung oleh semua *stakeholders* terutama pada empat sisi akses yaitu akses usaha, akses pasar, Akses SDM dan akses teknologi).
2. Usaha yang perlu dilakukan dalam jangka pendek antara lain pelatihan manajemen dan kreativitas dalam produksi serta pengawasan dan monitoring proses produksi, merintis rumah dagang, pameran, membuat leaflet, booklet, catalog, memberikan informasi pasar, informasi pameran perdagangan, memberikan konsultasi bisnis, pelatihan manajerial, kewirausahaan, pemasaran dan distribusi, dan akses teknologi.
3. Dalam jangka panjang perlu dilakukan kegiatan dalam akses usaha antara lain membuat perencanaan proses produksi, melakukan kerja sama dengan *stakeholders* lokal, menyediakan tenaga penyuluh, membuka lembaga pendidikan dan ketrampilan, bimbingan konsultasi HaKI/ patendan fasilitasi peralatan produksi, perlindungan HaKI/paten, dalam akses pasar mengupayakan bapak angkat, menyediakan lokasi sentra khusus industri batu bata dan genteng, menyelenggarakan pameran perdagangan tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Octavia dkk (2012), Evaluasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Penerima Bantuan Pemerintah dan Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Bersangkutan Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Provinsi Jambi.
- Anonim, 2008. Kebijakan Pembagungan UKM Departement Industri dan Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta
- Ardi Said dan N. Ika Wijaya. 2007. *Akses Keuangan UMKM. Buku untuk Membangun Akses Pembiayaan bagi Usaha Menengah, Kecil dan Mikro*. Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung e.V. dan GTZ-RED.
- Crowther, D., Seifi, S. (2010). *Corporate Governance and Risk Management*. Ventus Publishing ApS.
- Dahmiri, 2013. Upaya Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Rangka Mendorong Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
- Glen, Andrew (1993). *Community and Public Policy*. Pluto. London
- Glueck, WF & Jauch LR. 1994. *Manajemen strategis dan kebijakan perusahaan*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Isbandi Rukminto Adi. 2003. *Pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas : pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis*. Seri Pemberdayaan. Edisi revisi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mulbert, P.O. (2010). *Corporate Governance of Banks after the Financial Crisis-Theory, Evidence, Reforms*. ECGI Law Working Paper.

- Susilowati, Indah; Mujahirin Tohir; Waridin; Tri Winarni; Agung Sudaryono 2005. Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Usaha Mikro, ecil, Menengah Dan Koperasi- UMKMK) Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Kabupaten/Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Universitas Diponegoro. Tahun II. Riset Unggulan Kemasyarakatan dan Kemitraan (RUKK). Tahun II. Ristek. Jakarta
- Sucherly (2003), Peranan Manajemen Pemasaran Stratejik dalam Menciptakan Keunggulan Posisional serta Implikasinya terhadap Kinerja Organisasi Bisnis dan Non Bisnis (Pendekatan 5-A). Orasi Ilmiah. Universitas Padjajaran, Bandung.
- Tambunan , 2002. *Perekonomian Indonesia. Teori dan Temuan Empiris*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2008 *tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.
- Wahono, Ary. 2001. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Media Presindo. Yogyakarta